

# Community Empowerment Trough Community Development: Independent Young Entrepreneur Community Development Program

## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas: Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari

**Novi Ummi Nur Aeni** <sup>1\*</sup>, **Esa Septian**<sup>1</sup>, **Rupiarsieh**<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

\*Corresponding Author: [noviummi286@gmail.com](mailto:noviummi286@gmail.com)

**Abstract:** The Independent Young Entrepreneurs Program (WISMANDI) was formed to respond to the unemployment rate. The completion of construction can lead to unemployment or the loss of project employees. his research aims to find out community empowerment through community development in the Independent Young Entrepreneurs Community Development Program. In addition, it also aims to find out the achievement of community empowerment indicators in the Independent Young Entrepreneurs Program and to provide a comprehensive overview of the extent to which this Program has empowered the Youth Organization and the community. This study use 4 (four) indicators, including access to information, inclusion and participation, accountability, and capacity of local organizations. This research uses a qualitative approach. Methods used to collect data through observation, interviews, and documentation. The informants involved in this study are six parties. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawn. The data validity techniques carried out in this study are through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The results of the study show that those empowered in this program are youth organizations, not the community at large. The Independent Young Entrepreneurs Program (WISMANDI) has succeeded in empowering the Bandungrejo Village Youth Organization through improving the economy and organizational capacity. However, there are obstacles to access to information that is not optimal in carrying out egg marketing targets, violations of AD/ART rules related to fund contributions to PAD, and the motivation of members who are still financially oriented or directly benefit-oriented. With this research, it is possible to evaluate the success and failure of the Independent Young Entrepreneurs program for community empowerment.

**Keywords:** Community Empowerment; Youth organizations; WISMANDI

**Abstrak:** Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) dibentuk untuk merespons angka pengangguran. Selesaiannya pembangunan dapat menyebabkan pengangguran atau kehilangan karyawan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas pada Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian indikator pemberdayaan masyarakat dalam Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana Program ini sudah memberdayakan Karang taruna serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu akses terhadap informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat pada penelitian ini berjumlah enam pihak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan yang diberdayakan dalam Program ini adalah karang taruna, bukan masyarakat secara luas. Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) berhasil memberdayakan Karang Taruna Desa Bandungrejo melalui peningkatan ekonomi dan kapasitas organisasi. Namun terdapat kendala pada akses informasi yang kurang optimal dalam melakukan target pemasaran telur, pelanggaran aturan AD/ART terkait kontribusi dana ke PAD, dan motivasi anggota yang masih berorientasi pada finansial atau manfaat langsung. Penelitian ini dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari ini untuk pemberdayaan masyarakat

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat; Karang taruna; WISMANDI

**History Article:** Submitted 02 December 2024 | Revised 16 December 2024 | Accepted 23 December 2024



© the Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**How to Cite:** (Aeni et al., 2024). Aeni, N. U. N., Septian, E., & Rupiarsieh. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas: Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 152–165. doi: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22371>

## Pendahuluan

Pengangguran sekarang menjadi masalah besar bagi pemerintah Indonesia. Pada Tahun 2022 proses pembangunan infrastruktur untuk industri minyak dan gas di Kecamatan Ngasem sudah hampir selesai. Selesaiannya pembangunan dapat menyebabkan pengangguran atau kehilangan karyawan proyek. Pengangguran merupakan satu dari masalah penting yang dialami beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain mempengaruhi ekonomi, tingginya angka pengangguran menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, kualitas hidup rendah, dan peningkatan kriminalitas. Pengangguran adalah individu yang tergolong dalam usia bekerja namun tidak bekerja karena tidak memiliki pekerjaan (Simanungkalit, 2023).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, (2022) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Situasi pengangguran cukup tinggi juga terlihat di Kabupaten Bojonegoro. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 4,69%. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti, pengangguran pemuda yang ada di Desa Bndungrejo Kecamatan Ngasem pada tahun 2022 terdapat 100 pengangguran. Dengan keterangan 79 orang mempunyai sertifikat dan pengalaman pekerjaan sedangkan 21 orang belum mempunyai sertifikat dan pengalaman bekerja. Meskipun APBD Kabupaten Bojonegoro sudah tergolong tinggi, angka pengangguran di daerah tersebut masih tetap tinggi. Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, APBD Kabupaten Bojonegoro diperkirakan sebesar 8,2 triliun, dengan realisasi total sekitar 1,8 triliun pada semester pertama tahun 2024 (Yuan Edo Ramadhana, 2024)

Dalam menghapus angka pengangguran, solusi terbaik yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Artinya, upaya pemberdayaan masyarakat ditujukan agar masyarakat mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara mandiri menuju peningkatan kesejahteraan (Surya et al., 2021). Selain itu, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeksplorasi potensi yang ada di setiap wilayah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara yang lebih baik lagi (Abadi et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat adalah solusi dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Hal ini dicapai melalui penguatan pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat (Suprastiyo, n.d.).

Proses pemberdayaan diharapkan mampu membantu kelompok masyarakat dari lapisan sosial terbawah untuk naik dan menjadi bagian dari kelas menengah atau atas. Dalam upaya mengurangi kemiskinan atau pengangguran, pemerintah memainkan peran penting sebagai aktor utama (Mangin & Kriswibowo, 2022). Pengembangan komunitas juga termasuk strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan komunitas, masyarakat diberikan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Program ini mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah lokal, menemukan solusi, dan mengelola sumber daya secara mandiri.

Program Pengembangan Masyarakat (PPM) adalah salah satu inisiatif PT Pertamina yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar area bekerja perusahaan. Program ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. PPM merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, yang mencakup program Corporate Social Responsibility (CSR), Program Bina Lingkungan (BL), dan Program Kemitraan (PK) (PT. Pertamina (Persero), 2020). Secara umum pelaksanaan program Pengembangan Masyarakat di Indonesia diatur pada KEPMEN ESDM NO. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kewajiban bagi perusahaan untuk berkontribusi pada masyarakat. Program PPM perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu

dipenuhi masyarakat, dan bentuknya bisa berupa pengembangan potensi yang ada atau menciptakan perubahan positif dalam masyarakat (Riyanti & Raharjo, 2021).

PT Pertamina EP Cepu (biasa disebut PEPC) adalah anak perusahaan (afiliasi) PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bisnis hulu minyak dan gas bumi (Taufiq, 2020). PT. Pertamina EP Cepu memulai sebuah Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dinamakan Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI), adalah program yang difasilitasi oleh Pertamina EP Cepu Zona 12 dan dikelola oleh Yayasan IDFoS Indonesia. Program ini dibentuk untuk merespons angka pengangguran yang di sebabkan pada tahun 2022 proses pembangunan infrastruktur untuk industri minyak dan gas sudah hampir selesai. Selesaiannya pembangunan dapat menyebabkan pengangguran atau kehilangan karyawan proyek. Oleh karena itu, PT. Pertamina EP Cepu membuat Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI). Diharapkan program ini akan membantu pemuda menciptakan peluang usaha, yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Memberdayakan masyarakat, terutama pemuda, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka adalah langkah strategis yang ditempuh (Septian, 2021). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat (Habib, 2021).

Pemberdayaan masyarakat di desa mencakup bermacam-macam program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan sosial, mendorong potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Septiana & Kumalasari, 2024). SKK Migas sebagai regulator industri hulu migas, telah menyetujui Program CSR Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI), yang merupakan salah satu program pengembangan masyarakat (PPM) (Ika & Yok, 2022).

Dalam observasi awal peneliti yang bersumber dari mitra pendamping Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI), mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang dialami pada saat melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) antara lain adalah kurangnya pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana program pada unit usaha di bidang peternakan dan juga budidaya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya et al., (2021) yaitu BUMDes Salamjaya hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kelemahan BUMDes Salamjaya terletak pada sumber daya manusia yang kurang dan kurangnya kesadaran pengurus tentang cara menjaga dan mengembangkan BUMDes Salamjaya.

Menurut Narayan (2002) teori pemberdayaan masyarakat memiliki 4 indikator yaitu akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Akses terhadap informasi, dimana informasi merupakan hal utama pada saat melakukan pemberdayaan agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Inklusi dan partisipasi, semua orang yang ikutserta pada proses pemberdayaan, baik pelaku maupun subyek. peran seseorang untuk keberhasilan kelompok pemberdayaan disebut partisipasi. Inklusi dan partisipasi saling berhubungan, yang berarti subyek pemberdayaan memiliki keinginan yang lebih besar untuk diberdayakan. Akuntabilitas, adalah keahlian individu dalam mengambil keputusan yang sesuai dan tujuan dari pemberdayaan. Hal tersebut meliputi kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat, mengatur waktu, menghitung dana, menghitung tenaga yang dibutuhkan, dan memprediksi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kapasitas organisasi lokal, menggambarkan keahlian komunitas dalam bekerja sama, berafiliasi dengan organisasi, menggunakan sumber daya yang tersedia, menangani masalah, dan melihat cara menyelesaikan masalah yang berbeda.

Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik ini di lakukan oleh, Gunawan et al., (2023) menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas hanya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, partisipasi mereka masih sebatas mobilisasi dan belum mencapai tingkat partisipasi yang sebenarnya. Karena tidak dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas, P3MD gagal memberdayakan masyarakat. Pendampingan yang kurang intensif menyebabkan kapasitas organisasi lokal masih lemah. Pengurus organisasi lokal tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu pemberdayaan. Penelitian selanjutnya adalah Humaira (2022) Hasil *study* ini menunjukkan akibat

dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BUMDes adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih rendah. Penelitian ini juga berfokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Purwasari.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mangin & Kriswibowo (2022), menunjukkan bahwa Program CSR Desa Wisata BCC untuk pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata BCC oleh Bumdesma sendiri tidak berjalan dengan baik, yang menghentikan kegiatan juga pemberdayaan di sana. Selain itu, dorongan dari pemerintah, terutama pemerintah desa, tidak banyak membantu karena desa tidak menyadari bahwa desa juga memiliki desa wisata BCC tersebut. Berdasarkan penelitian dahulu tersebut, dapat dilihat bahwa pemberdayaan Masyarakat dalam program CSR bisa dikatakan belum maksimal, terutama dalam hal menciptakan dampak berkelanjutan untuk masyarakat. Melihat hal tersebut, dapat dilihat bahwa kurangnya pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan komunitas berbasis kewirausahaan yang tidak hanya melibatkan pelatihan dan modal, tetapi juga pengembangan jejaring usaha lokal dan kolaborasi antar anggota komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas pada Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian indikator pemberdayaan masyarakat dalam Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana Program ini sudah memberdayakan Karang taruna serta masyarakat. Penelitian ini jika dilaksanakan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan untuk *stakeholder* yang terlibat dapat menjadi bahan evaluasi agar pemberdayaan dilakukan secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari ini untuk pemberdayaan masyarakat.

## Metodologi

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang perilaku dan tindakan subjek penelitian dengan menggunakan metode alamiah dalam konteks tertentu (Alasian, 2021). Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena tujuannya adalah untuk menguraikan permasalahan yang muncul serta mendeskripsikan data dalam bentuk kata – kata, yang sesuai dengan realitas yang diamati selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan memahami fenomena yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tersebut.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi agar peneliti mendapatkan data, fakta, dan informasi yang jelas dan aktual (Sugiyono, 2016). Sumber data merupakan entitas yang memberikan kontribusi terhadap perolehan data. Sumber data memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan juga memastikan pencapaian kesuksesan penelitian (Febriana & Wayan, 2018). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan pada penelitian ini berjumlah dari 6 pihak, yakni Yayasan IDFoS Indonesia, Karang taruna, kepala desa, Pekerja kandang, Kepala unit usaha, dan Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, proses untuk memilih, mengurangi, mengumpulkan, dan mengubah data mentah yang berasal dari catatan lapangan; penyajian data, cara informasi disusun secara sistematis sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan; dan penarikan kesimpulan, proses di mana makna data diperiksa, divalidasi, dan diuji untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya (Milles & Huberman, 1992). Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dari berbagai sumber; teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda; dan triangulasi waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data (Sidiq & Choiri, 2019).

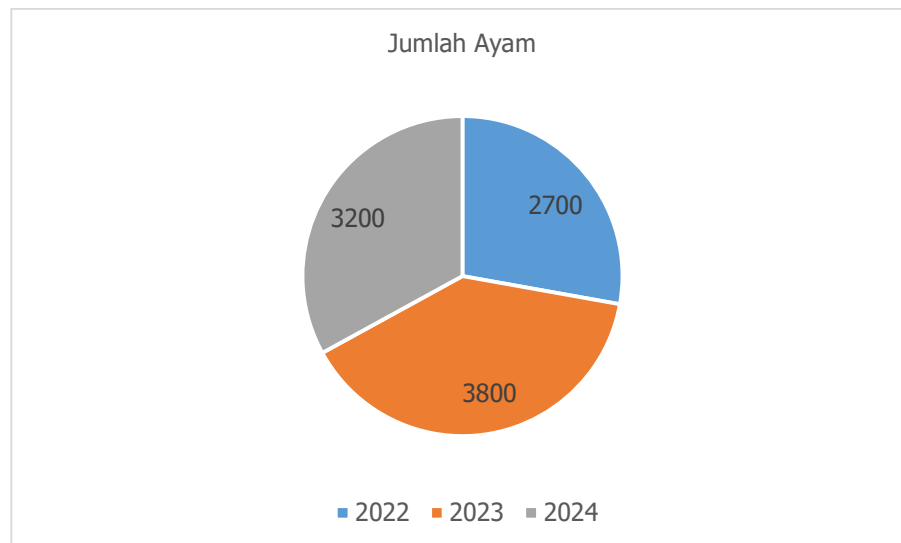
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Dasar pemilihan Lokasi tersebut karena program tersebut terletak di desa

Bandungrejo dan memiliki program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang masih belum pernah di teliti sebelumnya.

## Hasil dan pembahasan

Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari adalah program yang didukung oleh Pertamina EP Cepu Zona 12 dan difasilitasi oleh IDFoS Indonesia. SKK Migas sebagai regulator industri hulu migas, telah menyetujui Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI), yang merupakan salah satu program pengembangan masyarakat (PPM). Program ini mulai berjalan pada tahun 2022 dan di jalankan di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. PT. Pertamina EP Cepu melakukan studi sosiologi dan ekonomi pada tahun 2013 untuk menentukan pembuatan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI), yang menunjukkan bahwa petani dan peternak adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat di sekitar proyek. Dengan demikian, pengembangan ekonomi melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Wirausaha Muda Mandiri Berdikari (WISMANDI) akan menjadi dasar. Bisnis yang akan dijalankan oleh Masyarakat adalah bisnis yang berbasis potensi lokal atau bisnis yang sudah berjalan di Desa Bandungrejo, yaitu budidaya ayam petelur.

Program ini bertujuan untuk membantu pemuda desa yang kehilangan pekerjaan setelah proyek pengembangan migas JTB hampir selesai. Setelah sempat vakum selama sepuluh tahun, program budidaya ayam petelur membuat Karang Taruna tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi lebih aktif dan terarah dalam menjalankan aktivitas organisasi. Program ini, selain menawarkan alternatif pendapatan bagi pemuda desa yang kehilangan pekerjaan, juga membantu mengembangkan ekonomi desa secara keseluruhan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan peran aktif organisasi. Namun, dalam program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari, perubahan cuaca dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ayam, yang seringkali dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Berikut adalah jumlah data ayam pertahunnya:



(Sumber: Wawancara dengan Informan, 2024)

**Gambar 1.** Jumlah ayam pada Usaha Ayam Petelur pada Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari Tahun 2024

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat. Menurut Narayan (2002) teori pemberdayaan Masyarakat terdiri dari beberapa indikator, yaitu akses terhadap informasi, inklusi dan

partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal.

a. Akses terhadap informasi pada Program Wismandi

Menurut Narayan (2002) akses terhadap informasi merupakan hal utama pada saat melaksanakan pemberdayaan agar mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini akses terhadap informasi merujuk pada kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat mengenai pada program ini.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dalam indikator akses terhadap informasi dalam Program Wismandi sudah berjalan baik tetapi secara keseluruhan belum berjalan sesuai harapan. Hal tersebut terjadi karena, adanya miss komunikasi antara IDFoS Indonesia selaku pendamping program dengan Karang taruna selaku penerima manfaat program. Hal ini dapat dilihat bahwa saat akan diadakannya kegiatan dari pendamping program terlalu mendadak dalam memberikan informasi terkait apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian Sitompul et al. (2023) dijelaskan miss komunikasi antar pihak dapat menghambat keberhasilan program. Selanjutnya adalah kurang aktifnya media sosial dalam pemasaran telur. Hal ini dapat dilihat dari target pemasaran telur yang tiap tahunnya bertarget pada dua desa, namun yang terjadi pada tahun ini pemasaran hanya pada satu desa saja. Pada penelitian Rahmadiana et al., (2023) pemberdayaan pedagang kuliner di wilayah bajong rawa lawu menekankan bahwa media sosial adalah alat yang efektif untuk meningkatkan jangkauan informasi dan pemasaran produk lokal. Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa:

*"Terjadi miss komunikasi antara karang taruna dan IDFoS pada bentuk kegiatan. Contohnya itu pada saat ada umpulan antar peternak, terkadang pendamping program itu memberi kabar ke karang taruna apa yang di butuhkan dalam kegiatan itu terlalu mendadak." (S.U Sekertaris karang taruna)*

*"Kendala yang saya hadapi sebagai kepala unit usaha adalah pada IT karena media sosial kita kurang aktif. Untuk mempromosikan hasil dari usaha itu belum maksimal. Seharusnya target untuk tahun ini itu pemasaran harus mencapai dua desa terdekat, tapi sekarang baru mencapai satu desa." (D.D.W Kepala Unit Usaha ayam petelur)*



(Sumber: Dokumentasi Yayasan IDFoS Indonesia, 2022)

**Gambar. 2** Sosialisasi Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa akses informasi pada program ini sudah berjalan dengan baik. Informasi mengenai program ini sudah diterima oleh masyarakat luas. Dalam penyampaian informasi Yayasan IDFoS Indonesia mengadakan sosialisasi dan juga Musyawarah Desa yang turut mengundang Dinas – Dinas terkait, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan juga karang taruna. Dalam menyampaikan informasi mengenai program ini ke Masyarakat karang taruna menyampaikan melalui *face to face* pada saat Masyarakat membeli telur dan juga *mouth to mouth* saat Masyarakat dan karang taruna bertemu diluar forum.

b. Inklusi dan Partisipasi pada Program Wismandi

Menurut Narayan (2002) inklusi dan partisipasi merupakan dua hal yang saling berhubungan yaitu menguatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mampu diberdayakan. Inklusi berfokus pada siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi adalah tentang bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka dapat setelah menjadi anggota komunitas yang diberdayakan. Dalam hal ini akan lebih menekankan siapa yang diberdayakan dan bagaimana partisipasi pihak terkait dalam program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari merupakan program Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada karang taruna, bukan Masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan IDFoS Indonesia yang mengatakan:

*"Program wismandi ini kan program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang menjadi target dari program ini adalah pemuda desa lebih spesifiknya karang taruna bukan masyarakat secara luas." ( P.C Manager Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari)*

Pernyataan tersebut selaras dengan Pemerintah Desa Bandungrejo, mengatakan:

*"Yang di berdayakan dari program wismandi ini adalah karang taruna, bukan masyarakat secara luas." ( S. Kepala Desa Bandungrejo)*

Karang taruna sebagai sasaran dari program pemberdayaan ini juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dan hal tersebut sudah di buktikan dengan adanya masyarakat desa yang merasakan manfaatnya, seperti toko kelontong yang kulakan telur di Unit Usaha ayam petelur ini dan juga masyarakat yang bekerja di kandang ayam tersebut. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan narasumber yang mengatakan:

*"alhamdulillah di Desa Bandungrejo ini sudah ada budidaya ayam petelur. Jadi kalau saya kulakan tidak perlu jauh – jauh ke pasar desa sebelah dan kualitas telur disini juga masih fresh." (J, Salah satu pemilik toko kelontong)*

*"Dengan adanya program ini itu saya sangat merasakan manfaatnya. karena saya memiliki pekerjaan dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Bandungrejo." (T. W Pekerja kandang)*

Hasil penelitian yang terjadi di lapangan pada indikator inklusi dan partisipasi sudah berjalan dengan baik. setiap *stakeholder* yang terlibat telah berpartisipasi terhadap peran masing – masing. Banyak pihak termasuk IDFoS Indonesia, kepala desa dan pemerintah desa, karang taruna, tokoh masyarakat, dan pekerja kandang, yang berpartisipasi pada program budidaya ayam petelur Desa Bandungrejo dengan berbagai cara. IDFoS Indonesia membantu dan mengelola program dengan menawarkan pelatihan dan pendampingan keterampilan. Untuk menjamin keinginan program, kepala desa memberikan dukungan, lahan, petunjuk, dan pengawasan. Karang taruna terlibat dalam pelatihan, pertemuan desa, dan program unit manajemen usaha. Sementara pekerja kandang terlibat dalam operasional harian dan perawatan kandang, tokoh masyarakat memberikan dukungan moral kepada pemuda. Semua pihak menunjukkan komitmen mereka untuk keberhasilan dan keinginan program ini meskipun ada sebagian hambatan yang terjadi. Masyarakat luas juga merasakan manfaat dari adanya program ini.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Narayan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini pada Agustina & Sukmana (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemuda, pemerintah desa, dan

organisasi pemberdayaan masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemberdayaan desa. Program Wismandi ini berhasil menunjukkan betapa pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, partisipasi, yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan serta menjamin kelangsungan program.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator inklusi dan partisipasi pada program ini dapat dikatakan cukup bagus karena dengan adanya program ini karang taruna merasa lebih terarah juga lebih aktif kembali. Selain menawarkan alternatif pendapatan bagi pemuda desa yang kehilangan pekerjaan, juga membantu mengembangkan ekonomi desa secara keseluruhan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan peran aktif organisasi. Program Wismandi ini berhasil menunjukkan betapa pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, partisipasi, yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan serta menjamin kelangsungan program.

#### c. Akuntabilitas pada Program Wismandi

Menurut Narayan (2002) akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dan tujuan dari pemberdayaan. Dalam penelitian ini akuntabilitas berfokus pada mengatur waktu, pengelolaan dana, menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola kandang ayam, dan juga cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam hal mengatur waktu Yayasan IDFoS Indonesia bekerja sama dengan karang taruna untuk menentukan jadwal kegiatan. Namun dalam hal manajemen waktu masih terdapat tantangan tersendiri yaitu keterbatasan waktu karang taruna. Karang taruna mempunyai waktu untuk berkumpul atau bermusyawarah lebih banyak di malam hari karena selain itu karang taruna mempunyai aktivitas masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan IDFoS Indonesia yang mengatakan:

*"Dalam manajemen waktu itu hal yang menjadi tantangan bagi kami. Karena dari karang taruna mempunyai kumpul untuk musyawarah itu malam hari. Selain di waktu itu mereka mempunyai aktivitas sendiri." (P.C Manager Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari)*

Pengelolaan dana yang di peroleh dari Program Pengembangan Masyarakat melalui Pertamina EP Cepu Zona 12 dikelola langsung oleh Yayasan IDFoS Indonesia, sedangkan pengelolaan dana pada unit usaha ayam petelur pada program ini dikelola oleh karang taruna. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam proses pengelolaan dana ini dari program dan unit usaha ini sudah transparan tetapi pembukuan masih dalam bentuk laporan biasa tidak sesuai dengan dasar akuntansi. Hal ini sesuai pernyataan karang taruna yang mengatakan:

*"Pengelolaan dana pada unit usaha ini menurut saya sudah transparan, setiap selesai mengadakan kegiatan selalu ada transparansi anggaran meskipun kadang telat. Namun kekurangannya adalah pengelolaan dananya itu tidak dibukukan sesuai dengan akuntansi. Untuk menghitung laba ruginya sudah bisa, tapi hanya laporan secara sederhana tidak dibukukan menurut akuntansi." (S.U Sekertaris Karang taruna)*

Dana dari hasil unit usaha ini juga Kembali lagi ke pihak karang taruna. Tetapi yang tertera dalam AD/ART terdapat ketentuan beberapa persen dari hasil unit usaha tersebut harus di kontribusikan ke PAD, namun dari Pemerintah Desa menolak kontribusi dana tersebut. Saat ini, tiga pekerja kandang menjaga 3.200 ekor ayam di unit usaha ayam petelur, yang menurut Karang Taruna melebihi kebutuhan, karena satu pekerja dapat menjaga hingga 2.000 ekor ayam secara teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Karang taruna dalam pengambilan keputusan pada program ini menggunakan cara musyawarah yang dilakukan di balaidesa dengan anggota dan



pengurus karang teruna serta di damping oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh individu terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Narayan (2002) menekankan bahwa akuntabilitas dalam komunitas pemberdayaan terkait dengan transparansi keuangan dan memastikan bahwa semua orang terlibat secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, Karang Taruna, dan IDFoS Indonesia, sehingga tanggung jawab dan keuntungan dikelola bersama.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator akuntabilitas dalam program ini sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi Yayasan IDFoS Indonesia. Pentingnya akuntabilitas sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu pada Agustina & Sukmana, (2023) menunjukkan bahwa partisipasi dan transparansi keuangan masyarakat merupakan dua komponen yang sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan berbasis komunitas. Namun, masalah pembukuan keuangan yang sederhana dan efisiensi tenaga kerja yang terjadi pada program ini adalah masalah yang perlu diatasi untuk profesionalisme pengelolaan usaha. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi kehausan dan efisiensi program budidaya ayam petelur ini.

#### d. Kapasitas Organisasi Lokal pada Program Wismandi

Menurut Narayan (2002) peningkatan kapasitas organisasi lokal menggambarkan potensi sebuah komunitas untuk bekerja sama, berafiliasi dengan organisasi, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menyelesaikan masalah, dan melihat solusi konflik yang berbeda. Artinya dengan program ini melihat sejauh mana program ini membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas organisasi lokal untuk mengelola dan melanjutkan program ini secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan kapasitas organisasi lokal dalam program ini menunjukkan upaya besar untuk meningkatkan kemampuan kelompok melalui pelatihan dan koordinasi. Meskipun tidak bekerja sama secara resmi dengan dinas-dinas pemerintah, IDFoS Indonesia bekoordinasi dengan beberapa dinas yaitu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan. Salah satu kendala utama yang dihadapi IDFoS Indonesia adalah ketimpangan kemampuan SDM di desa, terutama dalam pengelolaan unit usaha ayam petelur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Yayasan IDFoS Indonesia mengatakan:

*"Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah kurangnya pengalaman SDM pada pengelola unit usaha pada bidang peternakan dan juga budidaya ayam petelur." (P.C Manger Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari)*



(Sumber: Dokumentasi Yayasan IDFoS Indonesia, 2022)

**Gambar 3.** Pelatihan Majemen Organisasi



(Sumber: Dokumentasi Yayasan IDFoS Indonesia, 2024)

**Gambar 3.** Rembug Jejaring Usaha Ayam Petelur Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas merupakan bentuk kegiatan untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan pelatihan pelatihan terkait budidaya ayam petelur, pelatihan digital marketing, pelatihan pembuatan tepung telur, pertemuan dengan peternak ayam, dan pemagangan di BUMDes Bandungrejo dan juga tokoh Masyarakat yang mempunyai usaha budidaya ayam petelur untuk menambah pengalaman SDM, juga rembug jejaring pengusaha budidaya ayam petelur. Namun dalam melakukan pelatihan – pelatihan ini terdapat tantangan lain yang dirasakan oleh Yayasan IDFoS Indonesia adalah motivasi Karang Taruna yang masih berorientasi pada keuntungan langsung. Penelitian Fatwa & Rasid, (2022) juga dapat dikaitkan dengan kendala motivasi anggota yang fokus pada keuntungan langsung. Penelitian ini menemukan bahwa Karang Taruna dapat mengubah paradigma anggotanya dari fokus pada keuntungan jangka pendek menjadi lebih memahami keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang dari berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, IDFoS Indonesia berusaha meningkatkan minat dan kemampuan anggota Karang Taruna melalui penilaian minat, kemampuan, dan niat mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan IDFoS Indonesia mengatakan:

*"Karangtaruna berorientasi kepada finansial atau manfaat langsung di karangtaruna. Jika ada pelatihan mereka harus ada transport. Sebenarnya ini termasuk tantangan bagi kami, bagaimana menumbuhkan minat mereka dari pemikiran semacam itu agar menjadi pengalaman yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut kita melakukan assesment dari mereka minatnya untuk kegiatan apa. Jadi menyesuaikan mereka bisanya apa, niatnya, kemampuannya seperti apa. Kemudian kita jadikan acuan untuk memilih pengelola usaha. Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas organisasi juga pengalaman karang taruna" (P.C Manager Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari)*

Dalam program ini Karang Taruna belum bekerja sama dengan toko atau mitra tertentu dalam pengelolaan unit usaha, tetapi sudah memiliki pelanggan tetap yang membeli produk telur dari Wismandi. Dalam memanfaatkan sumber daya, Karang Taruna dinilai telah cukup mampu, misalnya dengan penggunaan pakan ayam yang sesuai takaran. Dalam hal penyelesaian masalah, Karang Taruna mengandalkan musyawarah di balai desa dengan melibatkan pihak desa. Masalah atau konflik yang lebih besar diselesaikan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis masalahnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Karang taruna mengatakan:

*"Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pengelolaan unit usaha pada program ini kami selalu menyelesaikan masalah di balaidesa dengan musyawarah Bersama pihak desa. Namun tidak semua masalah kami selesaikan dengan sendiri. jadi dalam penyelesaian konflik kita mempunyai beberapa cara untuk mengatasinya, semua tergantung bagaimana masalahnya." (S.U Sekertaris Karang taruna)*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa pada indikator kapasitas organisasi lokal ini sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat tantangan yang dirasakan oleh Yayasan IDFoS Indoneisa. Namun melalui berbagai pelatihan, koordinasi, dan

pendampingan yang dilakukan IDFoS Indonesia, Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari telah menunjukkan peningkatan kapasitas organisasi lokal. Sebagai pengelola unit usaha, Karang Taruna telah mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik dan memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah bersama. Untuk keinginan dan pengembangan lebih lanjut, perlu terus diupayakan tantangan untuk mengubah orientasi dan motivasi anggota serta membangun strategi jaringan mitra.

**Tabel 1.** Ketercapaian Indikator pada Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari

<b>Indikator</b>	<b>Skala Ketercapaian (10% - 100%)</b>	<b>Capaian</b>
Akses terhadap Informasi	80%	Akses terhadap informasi pada program ini sudah baik dengan adanya sosialisasi dan musyawarah desa. Namun, ada masalah miss komunikasi antara pendamping dan Karang Taruna, serta berkurangnya aktivitas pemasaran produk di media sosial.
Inklusi dan Partisipasi	98%	Partisipasi aktif dari semua pihak telah berjalan dengan baik. Program yang diharapkan ini akan memberikan dampak positif pada masyarakat desa secara keseluruhan melalui pemberdayaan Karang Taruna sebagai fokus utama. Selain itu, program ini memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.
Akuntabilitas	80%	Pengelolaan dana dan waktu cukup transparan yang dilakukan dengan musyawarah. Namun, dalam pembukuan belum menggunakan pembukuan akuntansi.
Kapasitas Organisasi Lokal	89%	Pelatihan telah meningkatkan kapasitas Karang Taruna, namun masih ada masalah dengan mendorong peserta untuk fokus pada keuntungan langsung. Pengelolaan usaha dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah

(Sumber: Wawancara dengan Informan, 2024)

Tabel diatas merupakan gambaran ketercapaian indikator pemberdayaan masyarakat pada Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari. Tabel tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana setiap indikator tersebut tercapai dalam pemberdayaan masyarakat. Setiap indikator diukur dalam skala dari 10% (rendah) hingga 100% (tinggi). Selain itu, setiap pengukuran disertai dengan keterangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hasil yang dicapai. Selain pencapaian, juga terdapat temuan dalam proses penelitian pemberdayaan masyarakat dalam Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari ini. Temuan yang pertama dalam proses pemberdayaan masyarakat, akses informasi sangatlah penting, terutama untuk mendukung pengembangan dan pemasaran bisnis berbasis komunitas. Berdasarkan hasil wawancara dan dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial yang tidak aktif merupakan kendala utama yang menghambat proses pemasaran. Ketidakefektifan media sosial ini menghentikan promosi dan informasi sampai ke khalayak yang lebih luas. Akibatnya, target pemasaran pada

tahun ini adalah 2 (dua) desa terdekat tetapi yang terjadi proses pemasaran hanya terjadi pada 1 (satu) desa saja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat bermanfaat untuk pemasaran, kurangnya manajemen aktif dan terorganisir dapat menghalangi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas pada pengelolaan dana unit usaha ayam petelur pada Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari dalam AD/ART terdapat ketentuan bahwa beberapa persen hasil unit usaha ayam petelur ini harus di kontribusikan ke PAD, namun dari pihak Pemerintah Desa menolak kontribusi tersebut. Dengan alasan dana tersebut untuk pengembangan unit usaha saja. Hal tersebut sudah disepakati dari dua belah pihak yaitu Karang taruna dan Pemerintah Desa. Namun dari kesepakatan tersebut tidak ada perjanjian tertulis, dan tidak sesuai dengan administrasi. Padahal dari kontribusi dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan pihak Pemerintah Desa mengelola hasil dana kontribusi tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Jika dalam AD/ART telah ditentukan bahwa hasil usaha harus dikontribusikan ke Pendapatan Asli Desa (PAD), maka aturan tersebut wajib dipatuhi, kecuali ada dokumen resmi yang mengubahnya sesuai prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART. Kesepakatan secara lisan, meskipun telah disetujui kedua belah pihak, tidak cukup kuat untuk mengubah ketentuan AD/ART. Perubahan aturan hanya sah jika dilakukan melalui prosedur resmi, seperti musyawarah anggota atau forum yang sesuai, dan dituangkan dalam dokumen tertulis. Penolakan pihak desa terhadap kontribusi hasil usaha ke PAD tanpa dasar tertulis dapat dianggap melanggar AD/ART. Hal ini karena kontribusi tersebut merupakan kewajiban yang telah diatur secara eksplisit dalam AD/ART, sehingga pelaksanaannya menjadi keharusan selama aturan tersebut belum diubah.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Karang Taruna cenderung berkonsentrasi pada manfaat finansial langsung saat mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi lokal masih membutuhkan peningkatan dalam hal motivasi dan komitmen. Dengan pendekatan ini, kita menghadapi tantangan untuk membangun motivasi yang berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan kapasitas dalam jangka panjang, bukan hanya manfaat cepat. Ini menunjukkan bahwa pendampingan yang lebih adaptif sangat penting untuk membantu Karang Taruna memahami dan menghargai keuntungan non-finansial, seperti peningkatan keterampilan dan pengalaman, sebagai bagian dari pemberdayaan yang berkelanjutan. Penelitian relevan oleh Mulyantiningih et al., (2018) menunjukkan bahwa peserta dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial melalui pendampingan program berbasis konteks lokal. Studi ini menemukan bahwa program pelatihan yang menekankan keuntungan intrinsik, seperti peningkatan keterampilan kepemimpinan, lebih efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dibandingkan dengan program yang hanya memberikan materi insentif. Oleh karena itu, pendampingan adaptif yang tekanan nilai non-finansial seperti kemampuan dan pengalaman akan memenuhi kebutuhan Karang Taruna saat ini dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan jangka panjang.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari telah melaksanakan pemberdayaan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari seluruh indikator pemberdayaan masyarakat sudah terwujud walaupun ada beberapa indikator mempunyai tantangan dan kendala pelaksanaannya. Pada akses terhadap informasi terdapat kendala pada kurang aktifnya media sosial dalam melakukan pemasaran, sehingga target pemasaran tidak tercapai. Pada akuntabilitas terdapat pelanggaran AD/ART terkait kontribusi dana unit usaha ke PAD. Dan pada kapasitas organisasi lokal karang taruna hanya berorientasi pada manfaat langsung saja. Namun melalui berbagai pelatihan, koordinasi, dan pendampingan yang dilakukan IDFoS Indonesia, Program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari telah menunjukkan peningkatan kapasitas organisasi lokal.

Penelitian ini cenderung terbatas tidak mencakup analisis tentang dampak program pada perekonomian masyarakat secara luas dan penelitian ini hanya berfokus pada karang taruna sebagai penerima manfaat langsung pada program ini, sehingga pandangan masyarakat pada program ini kurang terwakili. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalam

dan luas dalam menganalisis program ini. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dari sudut pandang yang berbeda.

## Daftar Pustaka

- Abadi, R., Januwarso, A., Taufiq, A., & Suprastiyo, A. (2024). Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa ( POSYANTEKDES ). *JIAN Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 135–148.
- Aeni, N. U. N., Septian, E., & Rupiarsieh. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas: Program Pengembangan Masyarakat Wirausaha Muda Mandiri Berdikari. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 152–165. doi: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22371>
- Agustina, Y., & Sukmana, H. (2023). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna di Pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 438–454.
- Alasan, A. (2021). Metode penelitian kualitatif. In *PT. Rajagrafindo Persada* (Vol. 11, Issue 1).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2022-2023*. [Bojonegorokab.bps.go.id](http://bojonegorokab.bps.go.id).
- Fatwa, B. H., & Rasid, R. (2022). Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Umkm (Studi Kasus Karang Taruna Mahakarya Desa Sukamaju Sukabumi. *Jurnal Community Online*, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30921>
- Febriana, N. S., & Wayan, W. A. D. (2018). *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press.
- Gunawan, I., Israwan Setyoko, P., & Tobirin, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3Md) Di Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Managment Inquiry*, 7(2023), 722–734.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Ika, & Yok. (2022). *Berdayakan Pemuda Bandungrejo melalui usaha ayam petelur*. [Idfos.or.id](http://idfos.or.id).
- Mangin, A. Y., & Kriswibowo, A. (2022). Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1153. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2344>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Mulyantiningsih, A., Haryadi, & Indrayanto, A. (2018). Pengaruh Motivasi Intrinsik, Kepemimpinan Transformational, Efektivitas Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(03), 1–16.
- Narayan, D.-P. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank Publications.
- PT. Pertamina (Persero). (2020). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Rahmadiana, Kasusialaningrum, T., Herna, Salim, & Sutanto, V. W. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Dan Penjualan Online Bagi Pedagang Kuliner. *Jurnal Pegabdian Teratai*, 4(2), 243–250.
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility ( CSR ). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3.
- Septian, E. (2021). Skema Inovatif: Transformasi Digital Badan Usaha Milik Desa dalam Pemasaran Berbasis Elektronik. *Matra Pembaruan*, 5(2), 89–101. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.89-101>
- Septiana, A., & Kumalasari, A. (2024). Program tanggung jawab sosial perusahaan: Berbasis

- pada pengembangan masyarakat di desa. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jcse.v5i1.31445>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed., Vol. 53, Issue 9). CV. Nata Karya.
- Simanungkalit, E. F. B. (2023). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 16(1), 197–206. <https://doi.org/10.35508/jom.v16i1.9775>
- Sitompul, D. J., Laksmono, B. S., & Indonesia, U. (2023). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kang pismam di kota bandung. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 1–13.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suprastiyo, A. (n.d.). Peran Kepala Desa DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Suatu Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ). *JIAN Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 38–46.
- Surya, B., Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E. S., & Remmang, H. (2021). Community empowerment and utilization of renewable energy: Entrepreneurial perspective for community resilience based on sustainable management of slum settlements in Makassar city, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–37. <https://doi.org/10.3390/su13063178>
- Taufiq, A. (2020). Analisis Komunikasi Csr Pertamina Ep Cepu Pada Program Pengembangan Bumdesa. *Jurnal Dinamika Penelitian:Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 2(02), 199–226.
- Yuan Edo Ramadhana. (2024). *Satu Semester, Serapan APBD Bojonegoro 2024 Baru 21 Persen, DPRD Desak Evaluasi Rutin Kinerja OPD*. Radarbojonegoro.Jawapos.Com.